

Aset Masih Bermasalah

Bengkayang dan Kab Pontianak Wajar dengan Pengecualian

PONTIANAK--Pemerintah Kabupaten Pontianak dan Bengkayang diminta melakukan pembenahan aset daerah. Karena hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat untuk laporan keuangan tahun anggaran 2011, ditemukan aset kedua kabupaten itu masih bermasalah.

Sementara opini yang diberikan BPK untuk laporan keuangan Kabupaten Pontianak dan Bengkayang yakni wajar dengan pengecualian (WDP). Pencapaian tersebut sama dengan tahun sebelumnya.

"Opini merupakan pernyataan profesionalisme pemeriksa mengenai kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Semua berdasarkan empat kriteria, yaitu kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap penyajian laporan keuangan dan efektivitas penyelenggaraan SPI," kata Kepala BPK Perwakilan Kalbar Adi Sudiby, Kamis (31/5) disela penyerahan hasil laporan keuangan Kabupaten Ponti-

◆ Ke Halaman 15 kolom 5

Aset Masih Bermasalah

Sambungan dari halaman 16

anak dan Bengkayang.

Penilaian untuk Kabupaten Pontianak, yang menjadi pengecualian meliputi aset tetap belum disajikan secara memadai. Kemudian persediaan barang pakai habis belum disajikan secara memadai, investasi permanen belum disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, serta belanja pegawai dianggarkan pada akun yang tidak tepat dan realisasi belanja barang yang belum dikapitalisasikan.

Sorotan masalah aset juga menjadi penilaian BPK kepada pemerintah Kabupaten Bengkayang. Yakni nilai aset tetap belum memisahkan nilai aset tanah dari aset jalan, jaringan dan irigasi,

dan belum memisahkan barang inventaris dari aset peralatan dan mesin dan belum tuntasnya penyelesaian aset dari daerah pemekaran.

Kemudian nilai persediaan per 31 Desember 2011 belum didukung dengan pencatatan yang lengkap. Nilai penyerahan modal per 31 Desember 2011 belum didukung bukti yang memadai sebagai dasar untuk menyajikan nilai penyerahan, serta terdapat realisasi belanja modal posisi 31 Desember 2011 sebesar Rp350.707.981 direalisasikan mendahului fisik pekerjaan dan atas keterlambatan belum dikenakan denda.

Bupati Pontianak Ria Norsa berjanji untuk melakukan pembenahan aset selama tahun 2012. Dimana masalah aset memang menjadi per-

soalan serius bagi daerah usai melakukan pemekaran. Sementara empat hal yang menjadi kriteria dalam pemeriksaan akan menjadi perhatian pihaknya guna meningkatkan pencapaian hasil laporan keuangan pada masa mendatang.

Penyerahan laporan keuangan Kabupaten Pontianak dan Bengkayang turut dihadiri Kepala BPKP Provinsi Kalbar, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pontianak, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang, Inspektur Kabupaten Bengkayang, Inspektur Kabupaten Pontianak serta pejabat struktural dan pemeriksa di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar. (*stm*)